

**KETIADAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA ANGGOTA
BAWASLU STUDI KASUS BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2017-2022 HINGGA 2023-2028**

BONITA JULIEN GAIL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penyebab dari ketiadaan keterwakilan perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2017-2022 hingga 2023-2028. Meskipun telah ada *affirmative action* perempuan pada keanggotaan Bawaslu Provinsi yang tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 5 tentang Keanggotaan dan Persyaratan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) Alasan utama pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur karena Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu-satunya Bawaslu Provinsi di Indonesia yang sejak ditetapkan sebagai lembaga permanen hingga periode berjalan saat ini 2023-2028, tidak pernah ada satu pun perempuan yang menjadi anggotanya. Dengan melakukan wawancara dan menganalisis berbagai sumber catatan, penelitian ini menunjukkan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi ketiadaan keterwakilan perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam mewujudkan *politics of presence* perempuan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan kerja sama dengan semua lapisan golongan masyarakat, karena tidak adanya komitmen Bawaslu dalam menerapkan *affirmative action* lewat kuota, sehingga perlunya pengawalan kebijakan ini dari masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini mengharapakan kepada organisasi perempuan Kalimantan Timur untuk bergerak aktif mengawal keterwakilan perempuan dalam Bawaslu di Provinsi Kalimantan Timur, serta mengusulkan Bawaslu Pusat (Bawaslu RI) meningkatkan komitmen dalam memberikan ruang bagi perempuan dengan membuat skema sistem seleksi khusus perempuan agar dapat nyata mengimplementasikan *affirmative action* perempuan 30% pada keanggotaan Bawaslu.

Kata Kunci: *affirmative action*, keterwakilan perempuan, Bawaslu, representasi gender, partisipasi politik, Kalimantan Timur.

**KETIADAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA ANGGOTA
BAWASLU STUDI KASUS BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2017-2022 HINGGA 2023-2028**

BONITA JULIEN GAIL

ABSTRACT

The purpose of this study is to discover the root causes behind the persistent lack of female representation in the membership of the The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of East Kalimantan Province, spanning from the 2017–2022 period to the current 2023–2028 term. While affirmative action for women in the membership composition of Provincial Bawaslu is stated in Bawaslu Regulation Number 4/2022 Article 5, which requires a minimum of 30% female representation, East Kalimantan Province remains the only provincial Bawaslu in Indonesia that has never had a female member since the establishment of this institution as a permanent institution through the current 2023–2028 period. Through interviews and analysis of various records, this study explores the factors in the absence of female representation in the Provincial Bawaslu of East Kalimantan. The results thus indicate that the politics of presence for women in this institution requires collaboration among all sectors of society, in particular because of the lack of commitment by Bawaslu itself in enforcing affirmative action through quota implementation. To address these issues, the study recommends that women's organizations in East Kalimantan take a proactive role in promoting greater inclusion in the Bawaslu selection process. Additionally, this study also suggest that that National General Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) reinforce its efforts to improve the selection process for female candidates, ensuring that the 30% affirmative action policy is effectively implemented.

Keywords: *affirmative action, women's representation, Bawaslu, gender representation, political participation, East Kalimantan*